



Penguatan Institusi sebagai upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem pada Wilayah Perdesaan di Kabupaten Nagan Raya

Sailal Arimi^{1*}, Harmaini², Yasrizal³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia

sailalarimi@utu.ac.id^{1*}, harmaini@utu.ac.id², yasrizal@utu.ac.id³

Alamat: Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

Korespondensi Penulis: sailalarimi@utu.ac.id

Article History:

Received: Mei 25, 2025

Revised: Juni 09, 2025

Accepted: Juni 23, 2025

Published: Juni 25, 2025

Keywords: Community Service, Extreme Poverty, Institutions

Abstract: This Community Service (PKM) is motivated by various studies that explain that weak institutions at the village level in poverty alleviation have contributed to the failure of extreme poverty alleviation efforts so that rural areas in Indonesia are still the national poverty barn. Strengthening institutional elements such as rule of law, regulatory quality, transparency, government effectiveness and control of corruption can be key instruments to succeed in the poverty alleviation agenda in rural areas. The PKM activity in Alue Waki Village, Darul Makmur District, Raya Regency aims to increase knowledge and understanding in order to encourage dynamic cooperation between the government, private sector, and civil society in managing public resources to determine the direction of development, especially in terms of poverty alleviation. The method used is this activity is a participatory learning method through the delivery of several materials on poverty and institutional strengthening which is followed by discussion and questions and answers about the importance of the existence of strong institutions in poverty alleviation. The results of this community service implementation are expected to encourage the strengthening of institutions in the village for the success of poverty alleviation efforts.

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini di latar belakang oleh berbagai studi yang menjelaskan bahwa lemahnya institusi di tingkat desa dalam pengentasan kemiskinan telah berkontribusi terhadap kegagalan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga wilayah perdesaan di Indonesia masih menjadi lumbung kemiskinan nasional. Penguatan elemen institusi seperti penegakan hukum (*rule of law*), kualitas regulasi (*Regulatory quality*), transparansi (*transparency*), efektivitas pemerintahan (*Government effectiveness*) dan pengendalian korupsi (*Control Corruption*) dapat menjadi instrument kunci untuk menyukkseskan agenda pengentasan kemiskinan di wilyah perdesaan. Kegiatan PKM di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Raya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guna mendorong kerja sama yang dinamis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya publik untuk menentukan arah pembangunan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah kegiatan ini adalah metode pembelajaran pastisipatif melalui penyampaian beberapa materi tentang kemiskinan dan penguatan institusi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentang arti penting kebraadaan institusi yang kuat dalam pengentasan kemiskinan. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini, diharapkan dapat mendorong penguatan institusi di Desa untuk keberhasilan upaya pengantasan kemiskinan.

Kata Kunci: Pelayanan Masyarakat, Kemiskinan Ekstrem, Lembaga

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah sosial utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini terutama negara-negara berkembang. Upaya mengatasi masalah ini telah dilakukan secara luas dengan melaksanakan berbagai program kegiatan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan (Zhou, Guo & Liu, 2019). Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia telah mengalami sejarah pengentasan kemiskinan dalam periode yang cukup lama, Pada tahun 1960-an, Indonesia pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia, GNP per kapita Indonesia pada saat itu sekitar US \$50, kira-kira setengah dari Bangladesh dan Nigeria, pada saat itu kemiskinan tersebar luas di seluruh negeri, terdapat sekitar 60% dari populasi atau 70 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan absolut (World Bank, 1990).

Namun beberapa dekade setelah itu, khususnya pada era pembangunan orde baru, Indonesia pernah mengalami catatan yang sangat impresif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama masa tersebut yang diyakini berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Papanek, 2004). Meskipun demikian semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia telah mengalami perlambatan (Suryahadi *et al.*, 2012). Selain itu, isu utama lain yang tidak kalah penting terkait dengan persoalan kemiskinan di Indonesia adalah disparitas kemiskinan antara desa dengan kota masih sangat tinggi, dimana sampai saat ini desa masih menjadi lumbung kemiskinan Nasional (Biyase & Zwane, 2018; Castaneda *et al.*, 2016; N. Gounder, 2013; Huda *et al.*, 2020).

Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, berdasarkan undang-undang ini Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berbagai kepentingan masyarakat yang berada di dalamnya. konsekuensi dari lahirnya undang-undang ini, desa juga menerima bagian dana dari pemerintah setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, bahkan dalam (Kemendes, 2020).

Meskipun demikian sampai dengan saat ini, wilayah pedesaan masih menjadi kantong utama kemiskinan nasional, selain itu desa juga menghadapi sejumlah tantangan

yang mendesak untuk diselesaikan misalnya Isu-isu seperti tingkat pendidikan yang rendah, akses fasilitas kesehatan yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan jaringan sosial yang terbatas diantara beberapa tantangan sulit yang harus diatasi dalam pembangunan wilayah perdesaan, tantangan ini sering kali memerlukan upaya pembangunan yang unik dan inovatif seperti penguatan institusi guna mendorong pembangunan desa yang lebih efisien terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem.

Peran institusi dalam pembangunan ekonomi telah menarik banyak perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu kekuatan di balik perdebatan tersebut berada dalam ranah akademis, yaitu munculnya aliran pemikiran ekonomi yang kemudian disebut dengan Ekonomi kelembagaan baru (*New Institutional Economics*). Aliran pemikiran ini di pelopori oleh Ronald Coase dan Douglas C, North pada dekade 1990. Dalam karyanya *Institution*, North (1991) mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, aturan-aturan informal, dan proses penegakan aturan tersebut. Institusi hadir untuk mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) didalam proses pertukaran (transaksi).

Penguatan Institusi di wilayah perdesaan diharapkan akan mendorong penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien, penghindaran salah alokasi sumberdaya, mendorong investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuh kembangnya aktivitas usaha di wilayah perdesaan yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, bila institusi lemah akan menghambat kinerja perekonomian, dan kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami kegagalan (*policy failure*) yang akan makin memperburuk kerugian dari kegagalan pasar (Arsyad 2015).

Studi yang dilakukan oleh Tebaldi & Mohan (2010) menggunakan delapan ukuran alternatif Institusi dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia mengungkapkan bahwa perekonomian dengan sistem pengendalian korupsi yang kuat, pemerintahan yang efektif, dan sistem politik yang stabil akan menciptakan kondisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meminimalkan konflik distribusi pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Korupsi, pemerintahan yang tidak efektif, dan ketidakstabilan politik tidak hanya akan menghambat peningkatan

pendapatan melalui inefisiensi pasar, tetapi juga dapat mendorong peningkatan tingkat kemiskinan melalui peningkatan ketimpangan pendapatan. Sementara kualitas regulasi, penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas, memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan mendasarkan pada hasil studi Tebaldi & Mohan (2010). Pemilihan Desa Alue Waki sebagai tempat pelaksanaan pengabdian dilatarbelakangi oleh hasil analisis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang mengungkapkan bahwa Desa Alue Waki merupakan Desa dengan lumbung kemiskinan tertinggi di Kabupaten Nagan Raya dimana terdapat sekitar 677 rumah tangga miskin ekstrem berdomisili di desa ini berdasarkan kriteria Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2022.

2. METODE PENELITIAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dimana berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), Desa Alue Waki merupakan Desa dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem terbanyak di Kabupaten Nagan Raya, Berdasarkan kriteria Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2022 Rumah tangga miskin yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem yaitu rumah tangga yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4 yang mewakili kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan PKM di Desa ini diharapkan dapat mendorong penguatan Institusi yang kemudian berkontribusi terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan, ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang penguatan institusi (terutama menyangkut elemen institusi yang masih dianggap lemah) guna mendorong keberhasilan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat desa. Untuk mengukur pemahaman peserta terhadap arti penting penguatan institusi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem juga diselenggarakan pre-test dan pos-test. Pada tahap akhir kegiatan akan dilakukan simulasi pemetaan langkah-langkah dan contoh kongkrit penguatan institusi berdasarkan hasil analisis tentang keadaan desa Alue Waki secara menyeluruh terkait dengan institusi dalam kaitannya dengan upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hasil pemetaan ini akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil terutama di Desa Alue Waki dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada umumnya.

Perbaikan pada elemen institusi seperti penegakan aturan, kualitas regulasi, transparansi, efektivitas pemerintahan, dan pengendalian korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. Dengan melaksanakan rekomendasi langkah-langkah dan contoh konkret tentang penguatan institusi yang telah disusun, pemerintah desa dapat memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang lebih nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Sebelum pengabdian dilaksanakan, pada tahap pertama terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan Gambaran umum tentang wilayah perdesaan di Kabupaten Nagan Raya termasuk akses data kemiskinan terbaru yang menjadi rujukan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2029.



Gambar 1. Foto kegiatan koordinasi dengan Bappeda Kab. Nagan Raya

Setelah memperoleh gambaran umum tentang wilayah perdesaan di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari 222 desa dan akses data kemiskinan terbaru yang digunakan sebagai dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk menentukan wilayah perdesaan yang lebih urgen atau mendesak untuk dilaksanakan pengabdian dengan kriteria wilayah perdesaan lebih rentan yang dicirikan oleh desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin ekstrem terbanyak dalam Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan data P3KE maka Desa Alue Waki menjadi Desa prioritas untuk di laksanakan PKM.

Setelah menentukan desa tempat dilaksanakannya pengabdian, tahap selanjutnya adalah melaksanakan PKM dengan terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat dan para tokoh agama serta unsur forkopimda kecamatan. Kegiatan pertemuan ini bertujuan untuk mendekatkan diri terhadap tokoh atau orang-orang yang memiliki pengaruh ditingkat desa dengan harapan akan lebih memudahkan melakukan pendekatan terhadap masyarakat.

Pertemuan menghasilkan beberapa catatan penting berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pengentasan kemiskinan ditingkat desa dan nantinya akan didiskusikan bersama-sama dalam proses penyuluhan, ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang penguatan institusi. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang yang berasal dari unsur pememrintah Desa, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat Desa Aule Waki dan unsur forkopimda Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Alue Waki



Gambar 3. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Alue Waki

Penyampaian materi dan diskusi yang dilakukan untuk membahas beberapa permasalahan penguatan institusi dalam penanggulangan kemiskinan di desa Alue Waki terutama menyangkut dengan elemen institusi seperti penegakan aturan, kualitas regulasi, transparansi, efektivitas pemerintahan, dan pengendalian korupsi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. Penguatan penegakan aturan (rule of law) dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap sistem hukum, memastikan penegakan aturan yang adil dan tidak diskriminatif, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum

mereka. Sehingga aturan-aturan yang diciptakan dapat mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian (uncertainty) dan menekan biaya transaksi.

Penguatan institusi seperti penguatan kualitas regulasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan akses masyarakat, mengembangkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi secara berkala sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat menjadi penting untuk dilaksanakan. Penguatan kualitas regulasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dengan regulasi yang baik, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Penguatan elemen transparansi juga penting dalam pengentasan kemiskinan hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan layanan, seperti akses informasi mengenai program dan anggaran pemerintah, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana, dan juga dapat berupa upaya membangun sistem pelaporan yang efektif yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Misalnya, aplikasi mobile atau hotline untuk melaporkan masalah. Transparansi dalam pengelolaan dana dan program-program pengentasan kemiskinan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan sumber daya, hal ini akan mendorong peningkatan kepercayaan dari masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Penguatan elemen efektivitas pemerintahan desa dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah, meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk program yang lebih terintegrasi, melakukan evaluasi kinerja program secara berkala. Pemerintahan desa yang efektif mampu merencanakan dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dengan lebih baik, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Sementara penguatan elemen pengendalian korupsi dapat dilakukan dengan membangun sistem pengawasan yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan fungsi lembaga tuha peut, memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi, membentuk kelompok pengawas di tingkat desa yang terdiri dari perwakilan masyarakat untuk memantau penggunaan dana bantuan. Dengan adanya pengendalian korupsi yang lebih baik, dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dapat digunakan secara optimal untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat miskin sehingga membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan.

Tabel 1. Perubahan pada sasaran kegiatan

NO	TEMA/MATERI	KONDISI SEBELUM PENGABDIAN	KONDISI SETELAH PENGABDIAN
1	2	3	4
	Elemen Institusi		
1	Penegakan aturan (Rule of law)	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat kurang memahami pentingnya penegakan aturan dalam pengentasan kemiskinan	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat semakin memahami pentingnya penegakan aturan dalam pengentasan kemiskinan
2	Kualitas Regulasi (Regulatory quality)	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat kurang memahami peran penting dari regulasi guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan, dan perlindungan bagi kelompok miskin	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat telah memahami peran penting dari regulasi guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, akses terhadap layanan, dan perlindungan bagi kelompok miskin

3	Transparansi (<i>Transparency</i>)	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat kurang memahami peran penting transparansi dalam memastikan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi pengawasan terhadap program-program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat semakin memahami peran penting transparansi dalam memastikan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi pengawasan terhadap program-program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan
4	Efektivitas Pemerintahan (<i>Government effectiveness</i>)	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat belum memahami pentingnya Efektivitas pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam implementasi program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. seperti bantuan sosial, subsidi, pemberdayaan ekonomi, dan akses modal	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat semakin memahami pentingnya Efektivitas pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam implementasi program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. seperti bantuan sosial, subsidi, pemberdayaan ekonomi, dan akses modal
5	Pengendalian Korupsi (<i>Control Coruption</i>)	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat belum memahami pentingnya Pengendalian korupsi dalam pengentasan kemiskinan, terutama dalam penggunaan dan distribusi sumber daya yang seharusnya	Kepala Desa dan perangkat desa, unsur tuha peut (Badan Perwakilan Gampong), pengelola BUMG, perwakilan dunia usaha, dan tokoh masyarakat semakin memahami pentingnya pengendalian korupsi dalam pengentasan kemiskinan

		digunakan untuk membantu masyarakat miskin	terutama dalam penggunaan dan distribusi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin
--	--	--	---

Selama melakukan PKM tentang penguatan institusi di desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem terlihat partisipasi dan antusiasme seluruh komponen masyarakat di Desa Alue Waki sangat tinggi hal ini dapat memberikan dampak positif pada upaya penguatan konstitusi di desa dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai konstitusi serta peraturan yang berlaku di desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pre-test dan pos-tes tentang materi institusi dan perannya dalam pengentasan kemiskinan yang di selenggarakan untuk mengukur dampak pelaksanaan PKM terhadap sasaran, hasil pelaksanaan pre-test dan pos-tes dapat tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 1 diatas.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan PKM dan hasil diskusi dan tanya jawab yang diselenggarakan ditemukan sebuah fakta bahwa terdapat banyak elemen institusi di desa Alue Waki yang masih lemah, terutama dalam hal penegakan aturan, kualitas regulasi/peraturan gampong, transparansi, efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran dari peserta mengenai pentingnya penguatan institusi di desa dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di desa sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian Nurhadiyanti (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan regulasi dan pelaksanaan *good governance* di desa masih sangat rendah. Hasil ini juga sejalan dengan studi Safitri & Maghfur. (2023) yang mengungkapkan bahwa Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa masih sangat rendah. Namun dengan adanya pelaksanaan PKM telah berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Alue Waki tentang arti penting penguatan institusi di desa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap upaya untuk mendorong kerja sama yang dinamis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya publik untuk menentukan arah pembangunan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penguatan Institusi merupakan langkah krusial dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Desa Alue Waki Kabupaten Nagan Raya. Penegakan aturan yang tegas dan konsisten, kualitas regulasi atau peraturan gampong yang baik, transparansi, efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi akan menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi masyarakat, menghindari ketidakpastian yang menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Disamping itu penguatan institusi akan mendorong kerja sama yang dinamis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya publik untuk menentukan arah pembangunan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem, terutama dalam memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan

DAFTAR REFERENSI

- Backiny-Yetna, P., Wodon, Q., Mungai, R., & Tsimpo, C. (2012). *Poverty in Liberia: Level, profile, and determinants*. MPRA, The World Bank.
- Biyase, M., & Zwane, T. (2018). An empirical analysis of the determinants of poverty and household welfare in South Africa. *The Journal of Developing Areas*, 52(1), 115–130. <https://doi.org/10.1353/jda.2018.0008>
- Castaneda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen, M. C., Uematsu, H., & Azevedo, J. P. (2016). *Who are the poor in the developing world?* <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7844>
- Gounder, N. (2013). Correlates of poverty in Fiji: An analysis of individual, household and community factors related to poverty. *International Journal of Social Economics*, 40(10), 923–938. <https://doi.org/10.1108/IJSE-2012-0067>
- Huda, C. N., Ningrum, R. D., Armintasari, F., Herawati, Ramdhaningrum, H., Sagala, M., Thaariq, R. M., & Kartika, W. (2020). *Indeks kemiskinan multidimensi Indonesia 2015–2018*. Perkumpulan Prakarsa.
- Nurhadiyanti. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Jurnal Tanah Pilih*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187>
- Papanek, G. (2004). The poor during economic decline, rapid growth and crisis: The case of Indonesia. In *USAID Project on Pro-Poor Growth conducted by DAI and BIDE*. Bethesda, MD.
- Prakarsa. (2019). *Indeks kemiskinan multidimensi: Memotret wajah-wajah kemiskinan di Indonesia*. Prakarsa Policy Brief, April.

- Safitri, A. D., & Maghfur, M. (2023). Implementasi prinsip good governance dalam tata kelola pembangunan desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 243–256. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1417>
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic growth and poverty reduction in Indonesia before and after the Asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 209–227. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155>
- World Bank. (1990). *World development report 1990: Poverty*. World Bank Publications.
- Zhou, Y., Guo, L., & Liu, Y. (2019). Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice. *Land Use Policy*, 82, 339–348. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>